

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999. Otonomi daerah memberikan Pemerintah Daerah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bagian yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah salah satunya ialah pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pembuatan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Diberlakukannya otonomi daerah ini membuat masyarakat meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*), sehingga tuntutan tersebut mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Untuk itu, pemerintah harus melakukan pelaporan keuangan sebagai wujud dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat.

Informasi yang disajikan dan dipublikasikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah digunakan oleh banyak pihak dengan kegunaan yang berbeda-

beda, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan harus akurat dan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan mengacu pada SAP. Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Setiap tahunnya, kualitas laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah. Penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku hingga akhirnya menghasilkan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. Terdapat empat jenis opini yang diberikan, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Opini Tidak Wajar (TW).

PARIAMAN -- Kota Pariaman akhirnya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Walikota Pariaman Mukhlis Rahman menyatakan, untuk meraih opini WTP tersebut, selama ini sudah dilakukan usaha dan kerja keras dari semua pihak. Selama bertahun-tahun, Pemko Pariaman terus memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah. Mukhlis mengungkapkan, keberhasilan dalam meraih WTP tersebut tidak terlepas dari peranan SKPD dalam mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi dan standar operasional prosedur. Dukungan yang besar juga datang dari DPRD Pariaman. Ini merupakan WTP ke 3 yang diterima oleh Kota Pariaman dimasa kepemimpinan bapak Mukhlis Rahman. Rombongan Pemerintah Kota Pariaman juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman Fadhly, Kepala Inspektorat Lukmansyam dan jajaran, Kepala DPPKA Indra Sakti dan jajaran serta Kabag Humas Yalviendri

Sumber: *sumbarsatu.com, 11 Juni 2016*

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumatera Barat dinyatakan bahwa Kota Pariaman berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 yang sebelumnya pada tahun 2014 hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini terbukti bahwa Kota Pariaman mengalami peningkatan opini dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kota Pariaman. Berikut adalah daftar opini audit BPK atas LKPD Kota Pariaman selama lima tahun terakhir:

Tabel 1.1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Pariaman Tahun 2011-2015

No	Tahun	Opini BPK
1	2011	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2	2012	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas)
3	2013	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
4	2014	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
5	2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: www.bpk.go.id, IHPS Semester 1, 2016

Berikut adalah tabel perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014-2015:

Tabel 1.2 Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2015

Tahun	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TMP	%	TW	%	
2014	252	47%	247	46%	35	6%	5	1%	539
2015	312	58%	187	35%	30	6%	4	1%	533

Sumber: www.bpk.go.id, IHPS Semester 1, 2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI atas LKPD pada tahun 2015, terdapat 312 opini WTP (58%), 187 opini WDP (35%), 30 opini TMP (6%), dan 4 opini TW (1%). Perkembangan opini ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan opini atas 101 LKPD. Kenaikan opini tersebut meliputi dari TW atau TMP menjadi WDP sebanyak 17 LKPD, dan dari WDP menjadi WTP sebanyak 84 LKPD.

Terjadi peningkatan proporsi WTP setiap tahunnya merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kompetensi dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Pasalnya, dilihat dari IHPS I tahun 2016 tersebut, pemerintah belum sepenuhnya melakukan prinsip akuntabilitas karena masih tingginya persentase opini WDP dan masih terdapatnya opini TMP dan TW pada LKPD.

Selain itu, pemeriksaan BPK atas 533 LKPD 2015 mengungkapkan bahwa terdapat 6.150 kelemahan sistem pengendalian internal yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Untuk LKPD Kota Pariaman sendiri BPK mengemukakan bahwa terdapat tiga kelemahan sistem pengendalian internal yaitu kesalahan penganggaran belanja modal pada empat SKPD, penatausahaan asset tetap belum tertib, dan pengeluaran belanja tidak terduga tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang diisyaratkan.

Penelitian terdahulu terkait variabel tersebut telah banyak dilakukan seperti penelitian Harahap (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Yensi (2014) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Selain itu dalam penelitian Osti (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Octarinda (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD pada tahun 2015 termasuk atas LKPD Kota Pariaman dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mendorong penulis untuk meneliti kembali pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan objek penelitian Kota Pariaman. Pemilihan SKPD Kota Pariaman sebagai objek penelitian karena Kota Pariaman dinilai cukup berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman) “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman?
- b. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman?
- c. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman
- b. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama atau secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi Penulis
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

b. Bagi Penulis Lain

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung dalam penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Bidang ilmu

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengayaan lebih mendalam tentang akuntansi sektor publik, terutama mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian ini,

penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian menjelaskan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olahan data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian selanjutnya

